

**ANALISIS BEBERAPA FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI BELANJA DAERAH
DI KABUPATEN SUMENEP**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Ekonomi Pembangunan**



Oleh:

DEWI SINTANI ROHMAWATI

0711010037/FE/EP

Kepada

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAWA TIMUR
2011**

ANALISIS BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BELANJA DAERAH DI KABUPATEN SUMENEP

Yang diajukan

07110100 E/EP

Telah disetujui untuk disetujui oleh

Dr. Ignatia Martha, ME

Tanggal :

Drs. Ec. Wiwin Priana, MT
NIP. 030 207 234

USULAN PENELITIAN

ANALISIS BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BELANJA DAERAH DI KABUPATEN SUMENEP

Yang diajukan

DEWI SITI LANI ROHMAWATI

071110037/PL/16

Telah diseminasikan dan disetujui untuk disusun skripsi oleh:

Pembimbing Utama

Dr. Ignatia Martha, ME

Tanggal:



Mengetahui
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Drs. Ec. Wiwin Priana, MT
NIP. 030 207 234

SKRIPSI

**ANALISIS BEBERAPA FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI BELANJA DAERAH
DI KABUPATEN SUMENEP**

Yang diajukan

DEWI SINTANERU MAWATI

0711010037/EE/EP

Disetujui untuk dipas skripsi oleh

Pembimbing Utama

Dr. Ignatia Martha, MEd

Tanggal

**Mengetahui
Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Jawa Timur**

**Drs. Ec. Saiful Anwar, Msi
NIP. 030 194 437**

SKRIPSI

ANALISIS BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BELANJA DAERAH DI KABUPATEN SUMENEP

Disusun oleh :

DEWI SINTANI ROHMAWATI

telah dipertahankan dihadapan
dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Pembimbing :
Pembimbing utama

Dr. Ignatia Martha MSi

Tim Penguji
Ketua

Pradono H. Samud Huda, MT

Sekretaris

Dr. Ignatia Martha H. MSi

Anggota

Dr. Muchtolifah, SE, MP

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Dr. H. Dhani Ichsanuddin Nur, SE, MM

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat serta hidayah-Nya yang telah dilimpahkan sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu kewajiban mahasiswa untuk memenuhi tugas dan syarat akademik di Perguruan Tinggi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Fakultas Ekonomi khususnya Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan. Dalam penyusunan skripsi ini peneliti mengambil judul **"Analisis Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Belanja Daerah di Kabupaten Sidoarjo"**.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Hal ini disebabkan karena masih terbatasnya kemampuan dan pengetahuan yang ada. Walaupun demikian berkat bantuan dan bimbingan yang diterima dari Ibu Dr. Igrena Martha Hendrati, ME selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran telah mengarahkan dari awal untuk memberikan bimbingan kepada peneliti, sehingga skripsi ini dapat tersusun dan terselesaikan dengan baik.

Atas terselesainya skripsi ini, peneliti menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Teguh Soedarto, M.P, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

2. Bapak Dr. H. Dhani Ichsanuddin Nur, SE, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Bapak Drs. Ec. Wiwin Priana, MT selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Seluruh Staf Dosen dan Pengajar Jurusan Ilmu Studi Pembangunan, yang telah memberikan bekal Ilmu Pengetahuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Kedua orang tua saya, bapa dan ibu yang telah memberikan segala lentera kepada saya dan keluarga dengan sepenuh hati, baik secara materi maupun secara spiritual.
6. Aby (Faisal) dan orang-orang yang telah dukungan dan perhatiannya
Thank for U.

Akhirnya, semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, baik sebagai bahan kajian maupun sebagai salah satu sumber informasi dan bagi pihak lain yang membutuhkan.

Wasalamu’alaikum Wr. Wb.

Surabaya, 27 Mei 2011

Peneliti

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
ABSTRAKSI	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Landasan Teori	15
2.2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	14
2.2.1.1 Pengertian PDRB.....	14
2.2.1.2 Kegunaan Statistik PDRB	15
2.2.1.3 Metode Pendekatan	16
2.2.1.4 Struktur Pembentukan PDRB	19

2.2.1.5 Penyajian Atas Harga Konstan	23
2.2.1.6 Nilai Tambah Bruto, Cara Penyajian, dan Angka Indeks	25
2.2.1.7 Teori Keynesian (Harod-Domar)	28
2.2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	32
2.2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah	32
2.2.2.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah	32
2.2.3 Belanja Daerah	36
2.3 Kerangka Pemikiran	43
2.4 Hipotesis	45
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	47
3.2 Teknik Penentuan Sampel	48
3.3 Teknik Pengumpulan Data	48
3.3.1 Jenis Data	48
3.3.2 Sumber Data	49
3.3.3 Pengumpulan Data	49
3.4 Teknik Analisis dan Uji Hipotesis	50
3.4.1 Teknik Analisa Data	50
3.4.2 Uji Hipotesis	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Deskripsi Obyek Penelitian	60
4.1.1	Letak Geografis.....	60
4.1.2	Kependudukan	61
4.2	Deskripsi Hasil Penelitian	62
4.2.1	Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto	63
4.2.2	Perkembangan Pajak Daerah.....	64
4.2.3	Perkembangan Belanja Daerah	67
4.3	Analisis dan Pengujian Hipotesis	68
4.3.1	Analisis Fungsi Regresi Statistik (FRLUE).....	68
4.3.2	Analisis Regresi	72
4.3.3	Uji Cocokan Model.....	76
4.3.4	Uji Konsistensi Parsial (Df t).....	78

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan	84
5.2	Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

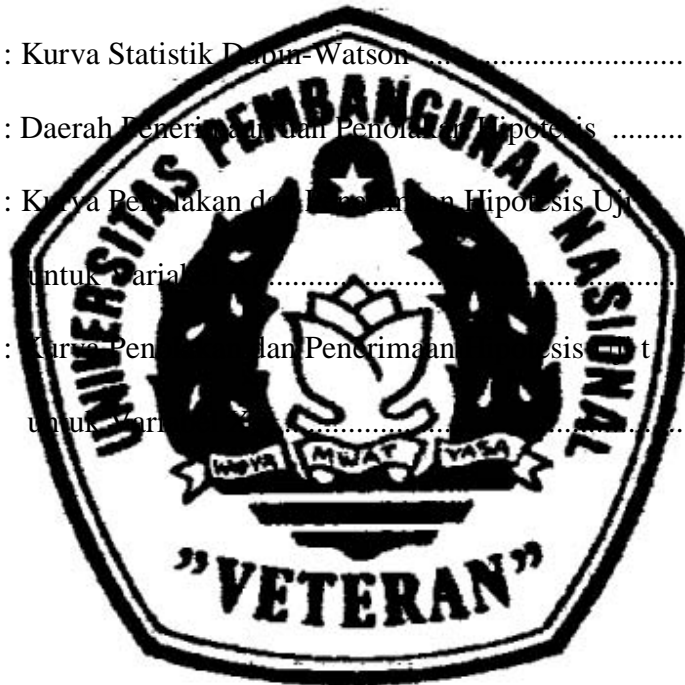
DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Perkembangan PDRB Kabupaten Sumenep	63
Tabel 2	: Perkembangan Pajak Daerah Kabupaten Sumenep	65
Tabel 3	: Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep.....	67
Tabel 4	: Uji Multikolinieritas	71
Tabel 5	: Korelasi antara Variabel Bebas dengan Residual	72
Tabel 6	: Hasil Perhitungan Regresi Linear Berganda	73
Tabel 7	: Analisis Variansi (ANOVA)	76
Tabel 8	: Hasil Analisis Variansi (ANOVA) dan Pajak Daerah (X_2), terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Sumenep (Y)	79



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Fungsi Produksi Harrod-Domar.....	30
Gambar 2	: Diagram Kerangka Pemikiran	43
Gambar 3	: Kurva Uji Hipotesis dengan Uji F	51
Gambar 4	: Kurva Uji Hipotesis dengan Uji t	53
Gambar 5	: Kurva Uji Durbin-Watson	56
Gambar 6	: Kurva Statistik Durbin-Watson	70
Gambar 7	: Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesis	78
Gambar 8	: Kurva Penolakan dan Penerimaan Hipotesis Uji untuk Variabel	80
Gambar 9	: Kurva Penerimaan dan Penerimaan Hipotesis Uji untuk Variabel	81



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Tabulasi Data *Belanja Daerah* (Y), *PDRB* (X_1), *Pajak Daerah* (X_2),
di Kabupaten Sumenep Tahun 1994-2009

Lampiran 2 : *Descriptive Statistics*

Model Summary^b

Anova^b

Lampiran 3 : *Coefficients*

Correlations

Nonparametric Correlations

Lampiran 4 : Tabel Pengujian Nilai F ($\alpha = 0.05$)

Lampiran 5 : Tabel Pengujian Nilai t

Lampiran 6 : Tabel Durbin-Watson



ANALISIS BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BELANJA DAERAH DI KABUPATEN SUMENEP

Oleh:

Dewi Sintani Rohmawati

Abstraksi

Pemberian otonomi dan tanggung jawab yang lebih besar dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah pada prinsipnya dimaksudkan untuk membantu pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintah pada umumnya. Disamping itu, tujuan lain dari pemberian otonomi daerah adalah untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat terutama dalam masalah keuangan sehingga daerah dapat membiayai keuangannya secara mandiri. Salah satu yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah dalam pengelolaan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel Produk Domestik Regional Bruto (X₁), Pajak Daerah (X₂) terhadap Belanja Daerah. Alat analisis yang digunakan yaitu regresi linier berganda dengan menggunakan data sekunder selama 16 tahun.

Dari pengujian hipotesis dinyatakan bahwa hasil Uji F (Uji Kecocokan Model) variabel Produk Domestik Regional Bruto (X₁), dan Pajak Daerah (X₂), berpengaruh positif (nyata) terhadap Belanja Daerah (Y), dengan $F_{hitung}=166,526 > F_{tabel} = 3,81$ pada tingkat signifikan $\alpha = 5\%$ dengan derajat $df = (2;13)$. Dimana Adjusted R Square 0,957 atau 95,7% sedang lainnya 4,3% [100% - 95,7%] dijelaskan oleh variabel lain. Dari pengujian hipotesis dinyatakan variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (X₁) menunjukkan $t_{hitung} = 3,16 > t_{tabel} = 2,160$ maka variabel Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh secara nyata terhadap Belanja Daerah (Y). Pajak Daerah (X₂) menunjukkan $t_{hitung} = 2,81 > t_{tabel} = 2,160$ maka variabel Pajak Daerah berpengaruh positif nyata terhadap Belanja Daerah (Y).

Dari pengaruh kedua variabel bebas terhadap Belanja Daerah Kabupaten Sumenep, yang terdiri dari tingkat Produk Domestik Regional Bruto (X₁), dan Pajak Daerah (X₂), dapat dilihat dari koefisien determinasi yang paling besar, dimana dalam perhitungan ditunjukkan oleh variabel tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan koefisien determinasi (r^2) sebesar 0,660² atau sebesar 43,56%.

Kata Kunci: PDRB, Pajak Daerah, Belanja Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan (manajemen) pemerintah daerah mengalami perubahan yang sangat berarti sejalan dengan diimplementasikannya otonomi daerah. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah telah memberikan arti penting bagi sistem pemerintahan pusat dan daerah, serta sistem hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. (Undang-undang tersebut belum dapat disempurnakan kembali dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004). Kedua ketentuan perundangan ini memberikan kesempatan yang sangat luas kepada pemerintah daerah, baik dalam penggalangan maupun optimalisasi pemanfaatan berbagai potensi yang dimiliki (Adi dan Setyawan, 2008 : 1).

Otonomi daerah disatu sisi memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah, namun disisi lain memberikan implikasi tanggung jawab yang lebih besar bagi pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemadirian untuk mengelola dan mengatur rumah tangganya sendiri akan terwujud dengan baik apabila terdapat dukungan (partisipasi) publik. Hal ini relatif akan dapat terwujud bila terjadi proses distribusi, baik pada kebutuhan masyarakat maupun

perolehan serta pembagian pendapatan untuk daerah dan masyarakat secara merata (Adi dan Setyawan, 2008 : 2).

Pemberian otonomi dan tanggung jawab yang lebih besar dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah pada prinsipnya dimaksudkan untuk membantu pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintah pada umumnya. Disamping itu, tujuan lain dari pemberian otonomi daerah adalah untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat terutama dalam masalah keuangan, sehingga daerah diharapkan mampu membiayai keuangannya secara mandiri. Salah satu yang menjadi perhatian pemerintah pusat adalah dalam pengelolaan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri (Masyhuri, 2007 : 1).

Usaha untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan kewenangan harus didukung oleh potensi ekonomi yang dimiliki daerah sebagai basis PAD. Hal ini disebabkan karena kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi kepada daerah sangat tergantung kepada aktivitas ekonomi yang mereka lakukan. Semakin tinggi aktivitas ekonomi yang dilakukan, akan meningkatkan pendapatan yang mereka terima dan seiring dengan hal itu usaha daerah untuk meningkatkan PAD melalui pajak daerah dan retribusi daerah dapat ditingkatkan (Masyhuri, 2007 : 2).

Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) di dalam penerimaan Pemerintah Daerah Tingkat I seluruh Indonesia relatif sangat kecil untuk

dapat membiayai pembangunan daerah. Sedangkan menurut prinsip otonomi daerah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah secara bertahap akan semakin dilimpahkan pada daerah. Usaha pemerintah untuk mengembangkan dan meningkatkan peranan dan kemampuan daerah dalam bidang ekonomi dan pengelolaan keuangan daerah ini, sebenarnya telah dicanangkan dan dimulai sejak pelita I. (Jaya, 1999) menyatakan bahwa sumber pembiayaan pembangunan yang penting untuk diperhatikan adalah pembiayaan sendiri karena sumber inilah yang merupakan wujud partisipasi langsung masyarakat suatu daerah dalam mendukung proses pembangunan. Pembiayaan daerah sendiri merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam bentuk pembayaran pajak dan retribusi daerah yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, yang pada akhirnya akan menaikkan pendapatan daerah (Masyhuri, 2007 : 2).

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diundang sebagai satu strategi yang memiliki tujuan ganda. *Pertama*, pemberian otonomi daerah merupakan suatu strategi untuk merespon tuntutan masyarakat daerah terhadap tiga permasalahan utama, yaitu *sharing of power, distribution of income*, dan kemandirian sistem manajemen di daerah. *Kedua*, otonomi daerah dimaksudkan sebagai strategi untuk memperkuat perekonomian daerah dalam rangka memperkuat perekonomian nasional untuk menghadapi era perekonomian bebas. Salah satu indikator turunnya ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat adalah meningkatkan

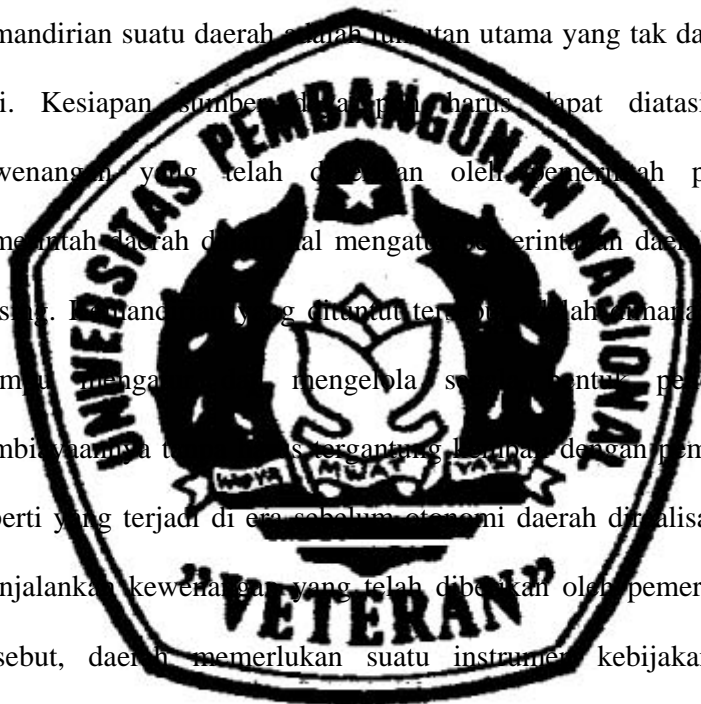
kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah, baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi sehingga daerah memiliki dana yang signifikan dalam rangka membiayai pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari PAD sangat ditentukan oleh faktor ekonomi atau potensi ekonomi yang memiliki prospek untuk dikembangkan bagi setiap daerah. Sedangkan kemajuan ekonomi suatu daerah sangat tergantung pada pola pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyediakan fasilitas publik guna mendukung aktifitas ekonomi (Masdhuri, 2012:3).

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan *output* perkapita diproduksi dengan produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita (Boediono, 1985). Pertumbuhan ekonomi yang dimaksudkan di sini adalah pertumbuhan ekonomi yang tercapai dari PDRB berdasarkan harga berlaku. Dalam produk domestik regional bruto PDRB Kabupaten/Kota Sumenep, menyebutkan 9 sektor-sektor ekonomi dalam PDRB antara lain;

1) Sektor Pertanian, 2) Sektor Pertambangan dan Penggalan; 3) Sektor Industri dan Pengolahan; 4) Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih; 5) Sektor Bangunan; 6) Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran; 7) Sektor Pengangkutan dan Komunikasi; 8) Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan; 9) Sektor Jasa-jasa. Kebijakan otonomi daerah merupakan pendelegasian kewenangan yang disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana dan sumber daya manusia

(SDM) dalam kerangka desentralisasi fiskal. Dalam menghadapi desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa potensi fiskal pemerintah daerah satu dengan daerah yang lain bisa jadi sangat beragam perbedaan ini pada gilirannya dsapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang beragam pula (Situngkir, 2009 : 1).

Menurut Prastiwi (2008 : 22) Di era otonomi daerah seperti saat ini kemandirian suatu daerah adalah tuntutan utama yang tak dapat dielakkan lagi. Kesiapan sumber daya yang harus dapat diatasi, mengingat kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan harus mengaturnya pemerintah daerahnya masing-masing. Kemandirian yang dituntut tersebut adalah dimana daerah harus mampu mengaturnya mengelola sumber-sumber untuk penerimaan dan pembiayaannya tersebut tidak tergantung kepada dengan pemerintah pusat seperti yang terjadi di era sebelum otonomi daerah di realisasikan. Untuk menjalankan kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintahan pusat tersebut, daerah memerlukan suatu instrumen kebijakan. Instrumen kebijakan yang paling utama bagi daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD mempunyai peranan penting dalam perencanaan, implementasi, dan pengendalian kinerja pemerintah daerah dalam 1 (satu) periode. APBD memuat segala bentuk penerimaan dan pembiayaan daerah dalam bentuk moneter atau Rupiah. APBD seharusnya dapat mengakomodir seluruh kebutuhan-kebutuhan suatu daerah namun di sisi lain juga tidak membebani secara berlebihan daerah yang



bersangkutan. Untuk itu APBD harus disusun dengan memperhatikan aspek ekonomis, efisiensi, efektivitas (*value for money*).

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran sektor publik pemerintah daerah sebenarnya merupakan *output* pengalokasian sumberdaya dan pengalokasian sumberdaya merupakan permasalahan yang mendasar dalam penganggaran sektor publik. Keterbatasan sumberdaya sebagai akar masalah utama dalam pengalokasian anggaran sektor publik dapat diatasi dengan pendekatan ilmu ekonomi melalui berbagai teori. Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah (Hartono, 2004). Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya anggaran belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan (Situngkir, 2009 : 1).

Anggaran belanja merupakan salah satu instrument kebijakan fiskal yang ditempuh pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian. Kebijakan fiskal bekerja mempengaruhi perekonomian melalui anggaran yang berfungsi sebagai alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Pada dasarnya kebijakan fiskal akan mentransfer tenaga beli masyarakat (berupa pajak, keuntungan, bea, dan/atau pinjaman) kepada pemerintah dan kemudian mentransfernya kembali kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dan disubsidi menurut pertimbangan tertentu. Kenyataannya menunjukkan bahwa transfer berperan sangat strategis dalam mempengaruhi perekonomian daerah. Strategi yang pengaruh transfer tidak bisa diabaikan dari interaksi antara penerimaan dengan alokasi belanja. Pada dasarnya dampak transfer sangat dipengaruhi berbagai faktor, pertama, adalah besarnya sumber seberapa besar proporsi transfer dialokasikan untuk membiayai berbagai jenis belanjanya. Kedua, seberapa besar jenis belanja tersebut dapat menstimulasi kegiatan ekonomi regional yang selanjutnya dapat diserap kembali dalam bentuk penerimaan dari daerah sendiri (Kuncoro, Haryo., 2007 : 195).

Agar tugas pemerintah yang diamanatkan oleh otonomi daerah dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif dibutuhkan sumber keuangan. Masalah keuangan daerah merupakan permasalahan yang esensial dan mendasar, termasuk bagi Pemerintah Kabupaten Sumenep. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maupun dalam rangka pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Sumenep memerlukan dana

operasioanal. Berdasarkan fakta-fakta di atas, perlu diadakan penelitian bagaimana pengaruh dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Sumenep.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang timbul adalah :

1. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Pajak Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Sumenep?
2. Manakah kedua variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Sumenep?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka tujuan yang hendak dicapai sehubungan dengan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Pajak Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui manakah diantara variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Pajak Daerah yang berpengaruh paling dominan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Sumenep.

1.4 Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian ini dapat dicapai, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti, Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai pelatihan intelektual, mengembangkan wawasan berfikir yang dilandasi konsep ilmiah khususnya Ilmu Ekonomi.
2. Bagi praktisi, Hasil peneliti ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo dan dapat menjadi acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Bagi akademik, Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan dan perkembangan Ilmu Ekonomi.

